

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAWASAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.863.674.600,00							14.999.883.187,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.863.674.600,00							14.999.883.187,00	
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan program peningkatan urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	12.247.574.600,00						-	13.331.083.187,00	
1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja	-			48 Laporan	95.000.000,00				4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	107.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				48 Laporan	40.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		74.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.01.0008		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	30.000.000,00	Kota Kupang, Sembak, Kecalalan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.01.0010		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			115 Orang/ Bulan	11.023.449.000,00				4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	11.828.457.587,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	11.023.449.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		11.828.457.587,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJAT AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan yang Anerut Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan dan Ketahanan Umum			12 Laporan		43.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017		Pencegahan Gangguan Keterlindungan, Ketahanan Umum dan Perindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengawasan dan Pengawasan			12 laporan		278.100.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat		678.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuatan Hak Asasi Manusia			115 Orang		35.000.000,00	Kota Kupang, Desa, Omboko	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019		Peningkatan atas Gangguan Keterlindungan, Ketahanan Umum dan Perindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusuhan Massa			12 Laporan		40.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02		Pengakuan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			4 Laporan		85.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	masyarakat		245.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			12 Laporan		5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	masyarakat		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			12 Laporan		65.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	masyarakat		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003		Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			12 Laporan					-	4. Reformasi birokrasi	masyarakat			

